

SKRIPSI

ANDRIKA SATRIYA NUGRAHA

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OPENING BANK
DALAM PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT**



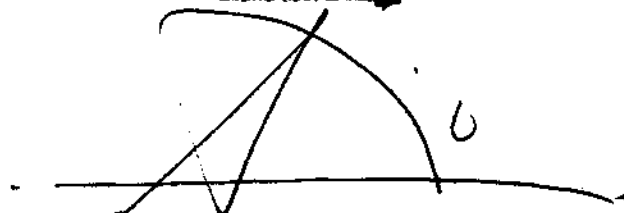
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI OPENING BANK DALAM PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT

SKRIPSI

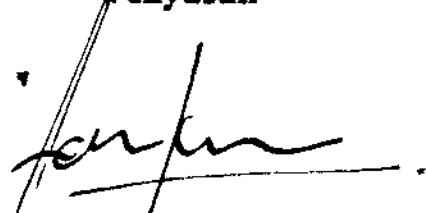
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Pembimbing,



H. A. Oemar Wongsedihirja, S.H.
NIP. 130325043

Penyusun



Andrika Satriya Nugraha
NIM. 039413920

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998**

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

- a. Opening bank sebagai bank pembeli yang membuka L/C kepada beneficiary, biasanya melakukan pembukaan L/C melalui bank perantaranya di luar negeri (negara beneficiary). Opening bank ini memiliki posisi yang lemah dan tidak menguntungkan dalam hal Applicant tidak melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesan. Untuk itu Opening bank dipaksa harus melakukan langkah-langkah preventif untuk menanggulangnya, dimana langkah-langkah pengamanan tersebut harus telah dimulai pada saat awal terjadinya pembukaan aplikasi L/C dengan memaksakan klausula-klausula dalam persetujuan yang kiranya akan mengamankan posisi dirinya termasuk didalamnya penyediaan jaminan, penyetoran porsekot nilai L/C yang disebut *marginal deposit*, bahkan adakalanya nasabah harus menandatangani pernyataan untuk menyerahkan hak kepemilikan dokumen-dokumen dan barang-barang sebagai obyek perjanjian yang telah merupakan syarat-syarat umum pembukaan L/C, karena pada dasarnya Opening bank telah dibebani kewajiban

yang sangat berat seperti yang diatur dalam pasal 9 uniform Custom and Practice for Dokumentary Credit, Revisi tahun 1993, Nomor 500. Secara rinci langkah-langkah preventif yang harus diambil untuk mengamankan posisi Opening bank adalah pertama pemberian pelayanan yang proporsional, kedua pemanduan untuk pengisian formulir agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjadinya penolakan pembayaran oleh Applicant, ketiga penolakan harus dilakukan bila terdapat kesalahan atau kekeliruan didalam aplikasi pembukaan L/C, keempat peningkatan sumber daya manusia agar kepentingan Opening Bank terjaga.

- b. Uniform Custom and Practice for Dokumentary Credit, Revisi 1993, Nomor 500 sebagai prinsip-prinsip tata laksana transaksi ekspor-impor internasional akan berlaku untuk semua dokumentary credit bilamana dalam teks yang bersangkutan secara tegas menyatakan tunduk kepada prinsip/peraturan tersebut. Secara praktek UCP-DC-500 tersebut ditunjang oleh peraturan-peraturan pelaksana untuk memperlancar pelaksanaan transaksi ekspor-impor tersebut, diantaranya adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang ketentuan umum dibidang impor.

Didalam kenyataannya pelaksanaan transaksi ekspor-impor tidak dapat dihindarkan dari terjadinya non-payment L/C oleh Applicant, atas terjadinya non-payment para pihak diberikan kebebasan dalam menempuh upaya hukum, baik upaya hukum non-litigasi maupun upaya hukum litigasi. Pada umumnya upaya hukum non-litigasi lebih banyak digunakan, karena dianggap lebih menguntungkan baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya, disamping itu dengan upaya hukum non litigasi diharapkan hubungan baik kedua belah pihak dapat tetap terjaga. Pada dasarnya upaya hukum non-litigasi dapat dibedakan menjadi negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

2.Saran

- a. Dengan posisinya, Opening bank diharapkan tidak berbuat semaunya, dengan arti kata menekan Applicant dengan klausul-klusul dalam perjanjian baku yang tentu saja akan menyulitkan Applicant dalam pemenuhannya dan menyalahi asas hukum kebebasan berkontrak.

Suatu kewajiban dan tindakan yang harus dikedepankan oleh Opening bank adalah melengkapi dirinya dengan personil yang cakap, profesionil, dan kompeten untuk menjaga kepentingan Opening bank.

Opening bank dapat juga mengadakan badan pemeriksa/surveyor di luar negeri (pada saat pemuatan barang ekspor dalam kapal) sehingga dapat dipastikan barang yang dimuat dengan dokumen yang dikirim adalah cocok, hal ini untuk menghindarkan opening bank dari usaha-usaha atau tindakan-tindakan curang para eksportir/importir (karena eksportir dan importir dalam hal ini dapat bekerja sama atau bahkan bisa juga merupakan satu orang.

- b. Dalam suasana kritis ini diharapkan agar pemerintah lebih dominan mengambil perannya didalam membuat perangkat aturan yang mempersingkat alur yang dilalui dalam perdagangan ekspor-import dan yang paling utama meyakinkan pihak asing atas kemampuan bayar dari bank dan pengusaha Indonesia.

Penyelesaian masalah Non-payment L/C melalui usaha non litigasi adalah alternatif yang terbaik dalam masalah sengketa perdagangan yang menempatkan nama baik dan kepercayaan serta hubungan baik pada prioritas utama.